



<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jsn>

DOI ://doi.org/10.33369/jsn.7.1.105-114

**TAWARAN DIALOG INTERKULTURAL
SEBAGAI PENGGANTI MULTIKULTURALISME DI EROPA
(Kajian Buku *Interculturalism and Multiculturalism: Similarities and Differences*)**

***INTERCULTURAL DIALOGUE OFFERS
AS A REPLACE FOR MULTICULTURALISM IN EUROPE
(Book Review *Interculturalism and Multiculturalism: Similarities and Differences*)***

Iklima Solichati¹, Belda Eldrit Janitra²

iklimasolichati12@gmail.com, beldaeldritjanitra@gmail.com

^{1,2}. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Buku ini membahas konsep interkulturalisme dan multikulturalisme dari segi konsep dan penerapannya. Pembahasan tersebut muncul sebagai upaya merespon keragaman budaya yang meningkat di Eropa sejak akhir abad ke-20 hingga sekarang. Interkulturalisme dan multikulturalisme mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan. Persinggungan dua konsep tersebut yang terletak pada persamaan masyarakat yang beraneka ragam budaya hidup bersama dengan segala polemiknya ini kemudian memunculkan perdebatan oleh sejumlah aktivis, politisi, dan akademisi. Dewan Eropa menilai bahwa masyarakat perlu untuk belajar dialog interkultural (antarbudaya) di samping multikulturalisme. Dunia pendidikan menjadi salah satu cara pengambil kebijakan untuk menanamkan sudut pandang interkultural di masyarakat dengan tatanan baru. Maka dari itu, banyak negara di Eropa dengan masyarakatnya yang multikultural mulai mengadopsi kurikulum pembelajaran interkultural di sekolah mereka. Penerapan dialog interkultural bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mampu menghargai satu sama lain di tengah keragaman budaya dan identitas primordial. Meski demikian, berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat serta semakin majunya ilmu pengetahuan telah membuat disparitas antara interkulturalisme dan multikulturalisme sebagai sebuah metode semakin tajam. Salah satunya, karena multikulturalisme dianggap telah banyak disalahartikan lewat kepentingan politisi dalam beberapa dekade terakhir. Oleh karenanya, saat ini sebagian ahli menawarkan interkulturalisme sebagai metode yang lebih cocok digunakan. Selain membahas persinggungan dua konsep tersebut dalam konteks Eropa, penulis juga membandingkannya dengan situasi yang terjadi di Indonesia hari ini.

Kata Kunci : Eropa, Interkulturalisme, Multikulturalisme, Pendidikan

Abstract

This book discusses the concepts of interculturalism and multiculturalism in terms of how it builds the ideas and applications. The discussion emerged as a response to the increasing cultural diversity in Europe from the end of the 20th century until now. Interculturalism and multiculturalism have several similarities and differences. The intersection of them has led to debates by activists, politicians, and academics. The Council of Europe considers that people need to learn intercultural dialogue (intercultural) in addition to multiculturalism. Education is one of the ways for policymakers to instill an intercultural perspective in society with a new order. Therefore, many multicultural societies in Europe Countries have begun to adopt intercultural learning curriculum in their schools. The application of intercultural dialogue aims to create a society that can respect others in cultural diversity and primordial identities situation. However, many problems arise in society and scientefic advancement has made the disparity of interculturalism and multiculturalism increasingly sharp as a method. Because, multiculturalism is considered to have been misinterpreted through the politician's interest in the last few decades. Therefore, the experts offer interculturalism as a better method to use. On the other hand, either discussing the intersection of the two concepts in the European context, the author also compares it with the situation that happens in Indonesia today.

Keywords : *Europe, Interculturalism, Multiculturalism, Education*

PENDAHULUAN

Dalam buku *Interculturalism and Multiculturalism: Similarities and Differences*, para penulis mengambil satu topik yang berfokus pada fenomena interkultural dan multikultural di Eropa. Buku ini terdiri dari sembilan artikel yang ditulis oleh delapan penulis. Salah satu penulis menulis dua artikel, termasuk artikel pembuka yang merangkum pendekatan dan sudut pandang yang digunakan oleh semua penulis di dalamnya. Masing-masing penulis mengangkat pembahasan yang berbeda, sehingga buku ini menjadi sangat kaya sudut pandang namun tetap dalam satu kerangka yang sama. Beberapa penulis mengajukan konsep interkultural sebagai jawaban atas multikulturalisme yang dianggap tidak cukup relevan. Konsep ini lebih menekankan pendekatan kebijakan dinamis yang menegaskan bahwa budaya harus diakui apa adanya, berbeda, dan terpisah seperti kelompok sosial tempat mereka berada. Sebagian penulis lainnya melakukan pendekatan pada bidang-bidang tertentu dalam memahami interkulturalisme dan multikulturalisme, seperti pendidikan, bahasa, dan praktik dalam masyarakat Eropa. Buku ini juga banyak membahas mengenai pengakuan dan pemberian hak istimewa pada kelompok minoritas yang juga diperoleh oleh kelompok masyarakat yang memiliki budaya dominan di Eropa.

Sembilan artikel yang dimuat dalam buku ini sebagian besar berangkat dari pemahaman pada panduan Buku Putih tentang dialog interkultural (antarbudaya) yang diterbitkan oleh Dewan Eropa. Secara garis besar, bab-bab dalam buku ini bisa dibagi berdasarkan pembahasan dan perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh penulis. Pada bab pertama, Barrett (2013) mengawalinya dengan pendahuluan yang jelas mengenai terminologi interkulturalisme dan multikulturalisme serta perkembangan keduanya. Barrett juga menyinggung pendekatan dan sudut pandang penulis lain yang ada dalam buku ini. Pada bab kedua hingga lima, buku ini memberikan penjelasan rinci tentang interkulturalisme yang ditulis oleh beberapa penulis seperti Bunjes (2013), Wilson (2013), Cantle (2013), dan Bouchard (2013). Lalu dalam bab keenam, Meer dan Modood (2013) yang menerangkan persinggungan antara interkulturalisme dan multikulturalisme dalam teori dan praktiknya. Pada bab ketujuh hingga sembilan, buku ini mencermati tiga topik perdebatan tentang interkulturalisme dan multikulturalisme dalam aspek bahasa, ciri khas, dan pendidikan. Masing-masing pembahasan tersebut ditulis oleh Gracia dan Byram (2013), Barrett (2013), serta Bekemans (2013).

Dalam sembilan judul topik yang dituangkan di buku ini masing-masing penulis memiliki ciri khas ketika mengupas sebuah fenomena. Meski demikian, secara keseluruhan buku ini cukup sistematis dalam menggambarkan tawaran interkulturalisme dan tantangan yang dihadapi multikulturalisme. Buku ini juga memasuki berbagai aspek penting seperti bahasa, ciri khas, dan pendidikan yang harus ada pada interkulturalisme yang saat ini dibutuhkan negara-negara di Benua Eropa dan negara-negara multikultural lainnya.

PEMBAHASAN

Multikulturalisme: Konsep dan Konteks di Eropa

Istilah multikulturalisme lahir pertama kali di Quebec, Kanada pada tahun 1971. Multikulturalisme merupakan jenis pendekatan kebijakan yang digunakan untuk mengelola masyarakat yang memiliki beragam budaya. Multikulturalisme merujuk pada situasi orang-orang yang memiliki kebiasaan, tradisi, bahasa, ataupun agama berbeda yang hidup berdampingan dalam ruang sosial yang sama. Mereka juga sama-sama memiliki keinginan untuk mempertahankan setiap aspek dari perbedaan yang dimiliki. Sejak runtuhnya Tembok Berlin dan masuknya gelombang besar imigran ke Eropa,

kebijakan multikultural telah lama diterapkan oleh beberapa negara besar di Benua Eropa tersebut. Negara-negara ini memberi pengakuan dan akomodasi yang sama terhadap kebudayaan kelompok minoritas dengan membuat kelonggaran untuk praktik dan kepercayaan mereka yang sangat mungkin berbeda dari kelompok dominan (Barrett 2013).

Salah satu cara yang ditempuh oleh Dewan Eropa sebagai pemegang kebijakan tertinggi adalah memasukkan kebijakan multikultural dalam ranah pendidikan. Pada tahun 2010, negara yang menganut multikulturalisme yang kuat memiliki beberapa fitur kebijakan seperti, (1). adaptasi multikultural dalam kurikulum pembelajaran sekolah, (2).memperbolehkan kepemilikan kewarganegaraan ganda, dan (3). penegasan multikulturalisme pada tataran konstitusional, legislatif, dan parlementer, baik di tingkat pusat atau wilayah. Pada mulanya pendidikan multikultural mempunyai tujuan agar populasi mayoritas dapat bersikap toleran terhadap para imigran baru. Studi ini juga mempunyai tujuan politis sebagai kontrol sosial penguasa kepada warganya untuk menjamin kondisi negara aman dan stabil. Namun dalam perkembangannya, tujuan politis tersebut menipis dan hilang karena landasan nilai pendidikan multikultural adalah demokrasi, humanisme, dan pluralisme (Yaqin, 2019).

Dalam artikelnya di buku ini, Cantle (2013) membantah bahwa multikulturalisme dan segala aspek yang meliputinya dapat bertahan dalam tatatan sosial baru di Eropa hari ini. Cantle terlebih dahulu menjelaskan bahwa keberagaman yang masif telah muncul di Eropa akibat dari pengaruh globalisasi. Dia mengakui bahwa globalisasi telah menciptakan masyarakat yang jauh lebih dinamis dan kompleks di dunia Barat. Hal ini telah membawa dampak tersendiri terkait gagasan dan kesadaran baru tentang identitas pribadi maupun kolektif. Di saat bersamaan, perubahan itu ikut menciptakan ketegangan dan konflik yang tidak bisa dihindari akibat banyaknya budaya, kepercayaan, atau nilai yang saling berinteraksi. Merebaknya partai-partai ekstremis sayap kanan di Eropa merupakan respons terhadap benturan budaya yang terjadi di masyarakat. Hal ini menandakan bahwa kebijakan multikultural yang telah dibuat oleh pemerintah tidak lagi sesuai untuk menengahi era baru tersebut. Cantle dan beberapa penulis lain di buku ini mengajukan satu pendekatan baru untuk membuat kebijakan yang lebih relevan, yaitu interkulturalisme (Cantle, 2013).

Perdebatan Multikulturalisme dan Interkulturalisme

Menurut Cantle (2013), multikulturalisme sama sekali tidak sejalan dengan tatanan dunia baru. Pernyataan Cantle searah dengan sebagian besar penulis lain dalam buku ini seperti Bouchard (2013), Wilson (2013), Barrett (2013), Bekemans (2013), dan Bunjes (2013) yang artikelnya menjelaskan tentang konsep interkulturalisme dalam buku putih. Namun, penulis lain seperti Meer dan Modood (2013) menganggap semua karakteristik interkulturalisme yang seharusnya berbeda telah ada dalam beberapa formulasi multikulturalisme. Meer dan Modood membuka peluang bahwa interkulturalisme sebagai antitesis dari multikulturalisme dapat digunakan dengan cara yang tidak selalu didukung oleh semua pendukung interkulturalisme. Mereka memahami bahwa interkulturalisme ingin menekankan kualitas positif dalam hal mendorong komunikasi, mengenali identitas yang dinamis, mempromosikan persatuan, dan menentang pengekangan. Namun bagi Meer dan Modood semua kualitas itu sudah ada dalam multikulturalisme. Bahkan mereka menganggap multikulturalisme saat ini melampaui interkulturalisme sebagai orientasi politik yang mampu mengakui bahwa kehidupan sosial terdiri dari individu dan kelompok, serta keduanya telah tercermin dalam konsepsi etis tentang kewarganegaraan.

Beberapa penulis di buku ini sebenarnya juga terlibat dalam penulisan buku antologi yang lain dengan tema serupa. Meer, Modood, Bouchard, dan Cantle menulis buku *Multiculturalism and Interculturalism: Debating the Dividing Lines* pada tahun 2016. Buku tersebut sama-sama membicarakan perbedaan mendasar antara multikulturalisme dan interkulturalisme namun dalam skala yang lebih luas dan ruang pembahasan yang agak berbeda. Buku terbitan Edinburgh University Press tersebut tidak hanya terbatas membicarakan perbedaan antara dua konsep pendekatan budaya dalam konteks masyarakat Eropa, melainkan dalam masyarakat Barat pada umumnya. Setidaknya di sana telah ditemukan empat hal yang menjadi garis pemisah antara interkulturalisme dan multikulturalisme, yaitu: *Pertama*, baik interkulturalisme dan multikulturalisme tidak hanya mencatat fakta yang tak terbantahkan tentang pluralisme budaya, tetapi melihat ini sebagai asset, meskipun masing-masing berkomitmen untuk mendamaikan keragaman dengan persatuan. *Kedua*, masing-masing memiliki musuh bersama dalam asimilasi dan ide-ide keanggotaan serta perspektif kebijakan yang tidak direkonstruksi tentang kewarganegaraan. *Ketiga*, ada keengganan umum terhadap

gagasan formalis (atau deontologis) liberalisme yang tidak mempertimbangkan peran dan fungsi budaya dan identitas. *Keempat*, masing-masing berupaya menyusun kembali ketentuan perlakuan yang adil dan setara melalui pencantuman perbedaan budaya (Barerro, 2016).

Meski demikian, buku *Interculturalism and Multiculturalism: Similarities and Differences* yang terbit lebih dahulu tidak bisa otomatis disebut usang. Selain karena terdapat perbedaan isi yang tidak ada di dalam *Multiculturalism and Interculturalism: Debating the Dividing Lines*, buku pertama juga mengambil posisi yang jelas dalam menentukan keberpihakannya pada interkulturalisme, tanpa menampik pemikiran Meer dan Modood yang berbeda. Lewat buku itu, pembaca diundang untuk mempertimbangkan tidak hanya argumen teoritis, tetapi juga pernyataan implikasi kebijakan yang terjadi dalam menarik kesimpulan mereka sendiri. Dalam *Interculturalism and Multiculturalism: Similarities and Differences*, sebagian besar penulis juga mengacu pada Buku Putih (mengingat konteks Eropa) yang diterbitkan oleh Dewan Eropa pada tahun 2008. Buku Putih mempunyai posisi yang jelas untuk menggantikan multikulturalisme oleh dialog interkultural/antarbudaya.

Tawaran Dialog Interkultural/Antarbudaya

Terdapat tiga masalah yang perlu dipecahkan oleh kelompok progresif Eropa di abad ke-21. Yaitu apakah masyarakat dapat hidup bersama dengan sederajat? Apakah masyarakat dapat hidup bersama dalam perbedaan? Dan apakah masyarakat dapat hidup di lingkungannya sendiri? Tiga pertanyaan tersebut berkaitan erat dengan kesejahteraan, keberagaman, dan ekologi. Wilson (2013) dalam artikelnya di buku ini memiliki kesimpulan dari pengamatannya atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wilson mengungkapkan bahwa pada tingkat yang signifikan, pertanyaan pertama dan ketiga hanya dapat dijawab jika tantangan kedua terpenuhi. Artinya, masyarakat harus bisa hidup dengan saling menerima satu sama lain di tengah keberagaman budaya dan identitas primordial sebagai syarat untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan dan menjawab permasalahan ekologis. Wilson adalah salah satu penulis yang menawarkan gagasan interkulturalisme sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat Eropa. Analisisnya mengacu pada Buku Putih terbitan Dewan Eropa tentang dialog

interkultural/antarbudaya dengan motto, “Hidup bersama sebagai sederajat dalam martabat”.

Tawaran pada dialog antarbudaya juga didukung oleh Bekemans (2013) dalam artikelnya yang mengungkapkan multikulturalisme berkaitan dengan pendekatan kebijakan yang mengakui keragaman budaya dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, multikulturalisme mengisyaratkan bahwa manusia mampu menggabungkan keragaman budaya dalam satu masyarakat di wilayah yang sama. Selain itu perbedaan yang ada di antara mereka dianggap sebagai kekayaan bersama tanpa perlu disangkal atau dihilangkan. Sedangkan interkulturalisme lebih menampilkan sifatnya sebagai pendekatan kebijakan dinamis yang menegaskan bahwa budaya harus diakui apa adanya, berbeda, dan terpisah seperti kelompok sosial tempat mereka berada. Hal ini mendukung dan mendorong interaksi yang saling menghormati dan terbuka di antara individu dan kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda, serta mengakui peluang berbagai budaya dalam masyarakat dan ruang tertentu. Sasaran pentingnya adalah untuk mendapatkan keuntungan bersama dari pertemuan antarbudaya, sambil menghormati keragaman yang ada, yang pada gilirannya dapat membantu mendorong toleransi dan pemahaman, mencegah konflik, serta meningkatkan kohesi sosial.

Jika sebelumnya salah satu promosi multikulturalisme dilakukan melalui dunia pendidikan, maka interkulturalisme juga melakukan hal yang sama. Bahkan pendidikan menjadi sektor paling penting untuk mendorong dialog antarbudaya, selain melalui promosi kebudayaan dan media. Hal ini sejalan dengan panduan Buku Putih yang terbit pada tahun 2008 untuk menetapkan fitur utama dalam dialog interkultural/antarbudaya. Buku ini menjelaskan arah dialog antarbudaya yang efisien di masyarakat Eropa, mengemukakan kritik antarbudaya, dan menggarisbawahi peran penting pendidikan dalam menerima orang dari latar belakang yang berbeda untuk hidup bersama secara demokratis dan harmonis. Secara umum, segala sesuatu yang telah dilakukan Dewan Eropa sejak pembentukannya pada tahun 1949 secara langsung atau tidak langsung terkait dengan pengelolaan dan promosi keragaman budaya dan dialog antarbudaya. Mandat intinya adalah untuk membela dan memperluas hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum. Tawaran dialog interkultural/antarbudaya sebagai ganti bagi kebijakan multikulturalisme yang tertinggal telah menjadi wacana yang bergulir deras di kalangan ahli di negara-negara Eropa. Namun demikian, dinamika yang memunculkan

multikulturalisme sebagai definisi alternatif tetap diberi ruang meski tidak bisa berada dalam posisi dominan.

Interkulturalisme dan Multikulturalisme di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, perdebatan antara interkulturalisme dan multikulturalisme dalam dunia akademik maupun aktivisme tidak berjalan sekencang Eropa. Berbagai literatur yang bisa ditemukan terkait dua pendekatan kebijakan ini seringkali terpisah satu dengan lainnya. Artinya, dalam sebuah karya biasanya hanya ditemukan pembahasan tentang multikulturalisme atau dialog antarbudaya *an sich*. Bahkan penggunaan kata “interkulturalisme” masih belum jamak digunakan dan lebih banyak memakai kata “antarbudaya” sebagai gantinya (Liliweri, 2018). Meski demikian, wacana tentang multikulturalisme cukup banyak mendapat tempat dalam dunia akademik di Indonesia dengan segala studi kasus dan pendekatan yang digunakan.

Secara sosio-kultural, heterogenitas masyarakat Indonesia dapat dikatakan setara bahkan lebih beragam daripada negara-negara di Eropa. Dengan populasi lebih 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu, mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, serta berbagai macam aliran kepercayaan dan agama lainnya. Tidak jauh dari negara-negara Eropa, keragaman ini menimbulkan berbagai persoalan yang dialami Indonesia sejak dahulu (Yaqin, 2019). Konflik SARA berbasis identitas primordial adalah bentuk nyata dari tantangan heterogenitas bangsa. Bahkan sampai hari ini, kebencian atas nama identitas diracik sedemikian rupa menjadi politik identitas. Dalam teori politik pernah ada rekomendasi yang cukup tegas untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Bagi sebuah negara yang menghadapi problematika akibat terlampau beragamnya kebudayaan daerah atau etnis yang sama-sama memiliki kontribusi pada pembentukan negara tersebut, ada dua alternatif pilihan kebijakan. Yaitu menobatkan kebudayaan salah satu etnis mayoritas-dominan sebagai budaya nasional atau berusaha keras menciptakan kebudayaan yang sama sekali baru dengan terlebih dahulu menumpas budaya-budaya yang sudah ada.

Untuk konteks Indonesia, tidak satu pun dari alternatif tersebut secara terang-terangan dipilih, meskipun dalam praktiknya kita bisa melihat terjadinya superimposisi kebudayaan etnik dominan melalui bermacam-macam kebijakan nasional. Tapi di sisi

lain, Indonesia juga memiliki sejarah keberhasilan politik kebudayaan ketika para pendiri bangsa justru mengembangkan bahasa Melayu menjadi bahasa nasional (bahasa Indonesia) daripada memilih bahasa salah satu etnis terbesar seperti Jawa atau Sunda (Budiman, 2007). Jika menggunakan sudut pandang tentang dua pendekatan kebijakan dalam buku *Interculturalism and Multiculturalism: Similarities and Differences* dan mengaitkannya dalam konteks Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep multikulturalisme di masyarakat Indonesia masih relevan sampai sekarang. Hal itu disebabkan oleh perbedaan akar masalah yang dihadapi antara negara-negara Eropa dengan Indonesia sendiri.

KESIMPULAN

Buku *Interculturalism and Multiculturalism: Similarities and Differences* berisi sembilan artikel yang mengupas perdebatan antara interkulturalisme dan multikulturalisme, terutama dalam konteks Eropa. Terkait dengan konteks itu pula, sebagian besar penulis di dalamnya menyepakati bahwa dialog interkultural perlu diterapkan mengingat permasalahan sosial-budaya di masyarakat Eropa semakin dinamis dan kompleks. Meski demikian, bukan berarti posisi penulis yang memiliki keberpihakan untuk mempertahankan gagasan multikulturalisme dilupakan begitu saja. Buku ini menjembatani perdebatan yang ada dan mengembalikan kesimpulan definitifnya kepada pembacanya. Selain itu, salah satu kekuatan buku ini yang paling menonjol adalah pembahasan terkait perdebatan interkulturalisme dan multikulturalisme dari berbagai aspek pentingnya.

Tawaran dialog interkultural untuk masyarakat Eropa hari ini banyak dibahas melalui Buku Putih terbitan Dewan Eropa yang menjadi acuan sekaligus pembahasan mendalam sebagian penulis dalam buku ini. Tawaran itu bukan tanpa sebab, karena para penulis pendukung interkulturalisme menjelaskannya melalui berbagai masalah yang muncul di Eropa dan penjabaran tentang pentingnya dialog interkultural secara rigit. Berawal dari konsep multikulturalisme yang lahir di Kanada dan berkembang menjadi wacana interkulturalisme di Eropa, buku ini menghadirkan para akademisi yang ahli di bidang tersebut untuk terus menggulirkan respons pada tantangan masyarakat Eropa.

Di sisi lain, dalam konteks Indonesia, tawaran dialog interkultural masih belum sampai pada wacana yang berkembang di dunia akademisi dalam negeri. Melihat akar

permasalahan yang cukup berbeda dengan Eropa, Indonesia masih mampu berpegang pada kebijakan multikulturalisme yang telah dianut sejak lama. Namun, tawaran atas interkulturalisme tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat akan dibutuhkan oleh negara-negara multikultur di dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barrett, Martyn. 2013. "Introduction – Interculturalism and Multiculturalism: Concepts and Controversies." P. 187 in *Interculturalism and Multiculturalism: Similarities and Differences*, edited by M. Barrett. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
- Budiman, Hikmat. 2007. "Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas." P. 350 in *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, edited by H. Budiman. Jakarta: The Interseksi Foundation.
- Cantle, Ted. 2013. "Interculturalism as a New Narrative for the Era of Globalisation and Super-Diversity." P. 187 in *Interculturalism and Multiculturalism: Similarities and Differences*, edited by M. Barrett. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
- Liliweri, Alo. 2018. *Prasangka, Konflik, Dan Komunikasi Antarbudaya*. 2nd ed. Jakarta: Kencana.
- Meer, Naser, Tariq Modood, and Ricard Zapata-Barerro. 2016. "A Plural Century: Situating Interculturalism and Multiculturalism." P. 284 in *Multiculturalism and Interculturalism: Debating the Dividing Lines*, edited by N. Meer, T. Modood, and R. Zapata-Barerro. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Yaqin, M. Ainul. 2019. *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi Dan Keadilan*. Yogyakarta: LKiS.